

































 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> <b>DP3ACSKB</b> Bidang PPKB</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	20 Juli '2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Juli '2020
	Disahkan Oleh	<p>Kepala DP: Provinsi Kepulauan</p> <p><b>Dra. SUSAN</b> Pembina Utar NIP.</p>
	<b>NAMA SOP</b>	Penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan kebijakan PL ekonomi, sospolhuk dan p
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<p>1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>2 Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di</p> <p>4 Permen PPPA No.4 tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG</p> <p>5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah</p> <p>6 Permen PPPA Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman umum Pengembangan Ir untuk meningkatkan keseja</p>	Mampu penyelenggaraan fasilitas, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan ekonomi, sospolhuk dan pelembagaan PUG	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>KELENGKAPAN/PERALATAN</b>	
	<p>1. Dokumen Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. lembar disposisi</p> <p>3. Dokumen / berkas</p> <p>4. Komputer/Printer</p> <p>5. ATK</p>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	

	Disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan manual (Print Out)
--	---

No	Kegiatan/Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	OPD, INSTANSI, LM	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (Menit)
1	Perintah/ Arahan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Lembar Disposisi	15
2	Memerintahkan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Lembar Disposisi	15
3	Membuat Konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							ATK, Peraturan	75
4	Mengetik Konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							ATK, Komputer/ Printer	120
5	Menyerahkan konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Konsep Surat/Nota Dinas	10
6	Memeriksa dan memaraf konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Konsep Surat/Nota Dinas	60
7	Memeriksa dan memaraf konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Konsep Surat/Nota Dinas	30
8	Memeriksa dan memaraf konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Konsep Surat/Nota Dinas	30
9	Memeriksa dan memaraf konsep Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG								
10	Menandatangani Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi, sopolhuk dan pelebagaan PUG							Surat/Nota Dinas	5

11	proses Administrai Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	180
12	Koordinasi Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						Surat/Nota Dinas	45
13	Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	120
14	menyusun Laporan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	180
15	memeritahkan mengetik laporan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	120
16	megoreksi dan menyampikan laporan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	60
17	megoreksi dan menyampikan laporan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	60
18	Menyampaikan Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisai pelaksanaan kebijakan PUG dan PP bidang ekonomi,sospolhuk dan pelebagaan PUG						berkas	30

3ACSKB  
Bangka Belitung

**ITI, MAP**  
na Madya

i, sosialisai  
JG dan PP bidang  
elembagaan PUG


PP bidang









Keterangan	
Output	
Disposisi	
Disposisi	
Konsep Surat	Hasil Rapat jika diperlukan
Konsep Surat	
Konsep Surat	
Konsep Surat	
Konsep Surat	
Konsep Surat	
Konsep Surat	
Surat/Nota Dinas	

[illegible]



<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>DP3ACSKB</div> <div>KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI</div>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	21-Jul-20
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	21-Jul-20
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Dra. Susanti M.AP Pembina Utama Madya NIP 196507130319932002
		NAMA SOP	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DASAR HUKUM			
1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 2 tahun 2016 tentang Pedoman umum pemberdayaan Perempuan		Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi	
2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
3 Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
KETERKAITAN		KELENGKAPAN/PERALATAN	
		1. Dokumen Peraturan Perundang-undangan 2. Hasil Rapat (Jika Diperlukan) 3. Komputer/Printer 4. ATK	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan manual (Print Out)	

No	Kegiatan/Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Sekretaris	Kabid PKHP	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan Pembuatan Keputusan Kepala Dinas						Lembar Disposisi	15	Disposisi	
2	Memerintahkan Pembuatan Keputusan Kepala Dinas						Lembar Disposisi	15	Disposisi	
3	Membuat Konsep Keputusan Kepala Dinas						ATK, Hasil Rapat, Peraturan	100	Konsep SK	Hasil Rapat jika diperlukan
4	Mengetik Konsep Keputusan Kepala Dinas						ATK, Komputer/ Printer	180	Konsep SK	
5	Menyerahkan Draf Keputusan Kepala Dinas						Konsep SK	10	Konsep SK	
6	Memeriksa dan memaraf Draf Keputusan Kepala Dinas						Konsep SK	60	Konsep SK	
7	Memeriksa dan Memaraf Draf Keputusan Kepala Dinas						Konsep SK	30	Konsep SK	
8	Memeriksa Keputusan Kepala Dinas						Konsep SK	30	Konsep SK	
9	Menandatangani Keputusan Kepala Dinas						Konsep SK	5	SK Kadis	

